

## RINGKASAN

Paradigma pemberantasan tindak pidana korupsi untuk tidak hanya melakukan pendekatan *follow the suspect*, namun juga diarahkan pada pendekatan *follow the money* dan *follow the asset* yang memberikan kewajiban kepada koruptor untuk memulihkan kerugian negara akibat tindak pidananya. Dalam kurun waktu tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 Kejaksaan Negeri Purwokerto telah melakukan penelusuran aset sebagai upaya pemulihan kerugian negara akibat tindak pidana korupsi, namun dalam peneluran aset tersebut tidak ditemukan aset milik tersangka, terpidana dan ahli warisnya yang dapat disita sebagai kompensasi pembayaran uang pengganti. Oleh karenanya dilakukan penelitian tesis yang berjudul “EFEKTIVITAS PENELUSURAN ASET SEBAGAI UPAYA PEMULIHAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA AKIBAT TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi Di Kejaksaan Negeri Purwokerto)”.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis. Sumber bahan hukum yang terdapat dalam penulisan ini berasal dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan teknik pengumpulan data primer dilakukan melalui wawancara seputar rumusan masalah yang sedang diteliti, pengumpulan data sekunder dilakukan dengan mengumpulkan data-data yang telah dihasilkan oleh pihak-pihak lain dan teknik analisis data menggunakan metode kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitan diketahui penelusuran aset yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Purwokerto untuk perkara tindak pidana korupsi yang ditangani tidak berjalan efektif, karena penelusuran aset yang merupakan rangkaian dari upaya pemulihan aset tidak dapat menemukan aset milik tersangka, terpidana atau keluarganya yang dapat dirampas dan digunakan sebagai kompensasi pengembalian kerugian keuangan Negara.

Kendala dalam penelusuran aset meliputi 3 (tiga) aspek, yaitu aspek struktur hukum yang meliputi : ketidak optimalan personil di Kejaksaan Negeri Purwokerto dalam melaksanakan penelusuran aset yang disebabkan oleh ketiadaan anggaran khusus penelusuran aset, aspek substansi hukum yang meliputi adanya peraturan yang mewajibkan bank untuk merahasiakan data-data nasabahnya, dan aspek budaya hukum yang meliputi keengganan tersangka atau terpidana untuk secara sukarela memberikan informasi atau menyerahkan asetnya sebagai kompensasi kerugian keuangan negara.

Untuk mengatasi kendala dalam pelaksanaan penelusuran aset dan agar kerugian negara tetap dapat dipulihkan maka Kejaksaan Negeri Purwokerto telah menempuh kebijakan-kebijakan pemulihan kerugian keuangan negara untuk kasus-kasus korupsi yang ditangani.

Kata kunci : efektivitas, penelusuran aset, pemulihan, kerugian negara.

## SUMMARY

*The paradigm for eradicating corruption is not only to follow the suspect approach but also to follow the money and assets approach, which gives the corruptor an obligation to recover state losses as a result of his crime. In the period from 2020 to 2022, the Purwokerto District Attorney's Office has conducted an asset search in an effort to recover state losses due to criminal acts of corruption; however, in the search for assets, no assets belonging to the owner, the convict, or their heirs were found that could be confiscated as payment for replacement money. Therefore, a thesis research project entitled "EFFECTIVENESS OF ASSET TRACKING AS AN EFFORT FOR RECOVERY OF STATE FINANCIAL LOSSES DUE TO CRIMINAL ACTS OF CORRUPTION (Studies at the Purwokerto District Attorney's Office)".*

*The approach method used in this research is sociological-juridical. The sources of legal materials contained in this writing come from primary legal materials and secondary legal materials, with primary data collection techniques carried out through interviews regarding the formulation of the problem being studied, secondary data collection carried out by collecting data that has been produced by other parties, and data analysis techniques using qualitative methods.*

*Based on the results of the research, it is known that the asset tracing carried out by the Purwokerto District Attorney for corruption cases being handled did not work effectively because the asset tracing, which is a series of asset recovery efforts, could not find the assets owned by the convict or his family that could be confiscated and used as assets. recovery of state financial losses.*

*Obstacles in asset tracing include three aspects, namely the legal structure aspect, which includes the suboptimal personnel at the Purwokerto District Attorney's Office in carrying out asset tracing caused by the absence of a special asset tracing budget; the legal substance aspect, which includes the existence of regulations requiring banks to keep secret customer data; and aspects of legal culture, which include the reluctance of suspects or convicts to voluntarily provide information or hand over their assets as compensation for losses to state finances.*

*To overcome obstacles in tracing assets and so that state losses can still be analyzed, the Purwokerto District Attorney has pursued policies to recover state financial losses for corruption cases handled.*

*Keywords: effectiveness, asset tracing, recovery, state losses.*